

## Wali Kota Baubau HYF Resmi Buka Konsultasi Publik Penyusunan RKPD 2027, Prioritaskan Kemiskinan dan Pelestarian Budaya



Laporan: Firman, Baubau Post-Durasi Times

BAUBAU, DT- Pemerintah Kota Baubau memulai rangkaian penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 melalui pelaksanaan Forum Konsultasi Publik yang digelar di Aula Kantor Wali Kota Baubau, Baubau, Rabu (18/2/2026). Forum ini dibuka secara resmi oleh Wali Kota Baubau, Yusran Fahim, sebagai langkah awal menentukan arah pembangunan daerah tahun mendatang.

Kegiatan tersebut menjadi wadah untuk menjangkau masukan berbagai unsur masyarakat, termasuk pimpinan DPRD Kota Baubau, Organisasi Perangkat Daerah, tokoh masyarakat, pelaku usaha,

Lanjut ke Hal: 7

## Dinas Pendidikan Buton Selatan Perketat Mekanisme PIP dan Hentikan Pembagian Merata



Laporan: Firman

BUTON SELATAN, BP-Dinas Pendidikan Kabupaten Buton Selatan menegaskan penerapan mekanisme ketat dalam penyaluran Program Indonesia Pintar (PIP) setelah menerima laporan adanya praktik pembagian dana secara merata di salah satu sekolah dasar. Penegasan ini disampaikan untuk memastikan bantuan pendidikan tersebut tetap tepat sasaran dan sesuai ketentuan nasional.

Peringatan tersebut disampaikan oleh Kepala Bidang Pembinaan Pen-

didikan Dasar, La Amiru SPd MPd., yang menilai pelanggaran aturan kerap terjadi karena minimnya pemahaman sekolah mengenai tata cara pengusulan penerima PIP. Ia menyebut bahwa mekanisme penyaluran telah dirumuskan secara berjenjang dan tidak dapat dimodifikasi oleh pihak sekolah.

"Program ini diberikan berdasarkan keputusan kementerian dan tidak boleh dibagi rata. Jika penerima hanya 50 orang, maka hanya 50 itu yang berhak menerimanya," tegas La Amiru dalam wawancara

resmi, Rabu (18/2/2026).

Ia menjelaskan bahwa proses pengusulan dimulai dari pendataan dan pembaruan data siswa di sistem Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Melalui sistem tersebut, sekolah mengidentifikasi siswa yang memenuhi syarat sebelum melakukan sinkronisasi sebagai bentuk pengajuan resmi ke arah pusat.

Setelah proses pengusulan, data yang dikirim sekolah akan diverifikasi dan divalidasi oleh Kementerian Pendidikan,

Lanjut ke Hal: 7

## IPA Wawoangi Siap Beroperasi, Bupati Buton Selatan Muh Adios Minta Penyediaan Listrik Dipercepat



Laporan: Ardi

BUTON SELATAN, BP-Pemerintah Kabupaten Buton Selatan terus mematangkan layanan dasar air bersih dengan mengevaluasi kesiapan Instalasi Pengolahan Air (IPA) Wawoangi di Desa Wawoangi, Kecamatan Sampolawa. Upaya ini dilakukan untuk memastikan kebutuhan air masyarakat dapat terpenuhi secara optimal dan berkelanjutan.

Peninjauan fasilitas yang dilakukan pada Sabtu (14/2/2026) tersebut menjadi langkah penting

pemerintah daerah dalam memastikan infrastruktur air bersih dapat segera difungsikan. Akses terhadap layanan air bersih sebelumnya menjadi isu krusial di beberapa wilayah pesisir Buton Selatan.

Dalam kunjungan itu, Bupati Buton Selatan H. Muhammad Adios turun langsung meninjau kondisi instalasi bersama Direktur Perumda Air Minum Tirta Lamaindo Buton Selatan, La Ode Sirlan. Keduanya memeriksa sejumlah titik penting, mulai dari mekanisme penyaluran, alur distribusi, hingga kondisi sumber air

baku yang menjadi tumpuan operasional.

Adios menilai seluruh fasilitas pendukung di IPA Wawoangi sudah mengarah pada standar pelayanan air minum yang layak. Berdasarkan pengamatannya, potensi debit air baku di kawasan tersebut diyakini mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dalam jangka panjang. "Secara teknis, fasilitasnya sudah memadai dan sumber airnya juga cukup baik untuk mendukung layanan air bersih," ujar Bupati.

Lanjut ke Hal: 7

## Satgas Baru ATR/BPN dan Telkom Fokus Selesaikan Sengketa dan Sertifikasi Aset Tanah



Laporan: Ardi

JAKARTA, BP-Upaya penyelamatan aset negara kembali diperkuat melalui pembentukan Satgas Akselerasi Legalisasi dan Penyelesaian Kasus Aset Tanah Telkom 2026 oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) bersama PT Telkom Indonesia. Langkah ini disahkan melalui penandatanganan Surat Keputu-

san Bersama pada Jumat, 20 Februari 2026, di Gedung Telkom Hub, Jakarta.

Pembentukan Satgas disaksikan langsung oleh Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Oddy Dermawan, serta Direktur Utama Telkom, Dian Siswarini. Keduanya menekankan bahwa kolaborasi ini merupakan langkah penting dalam menjamin keamanan aset negara, khususnya yang

dikelola oleh perusahaan BUMN di bidang telekomunikasi.

Dalam sejarah pengelolaan aset negara, Indonesia pernah menghadapi berbagai kasus sengketa tanah BUMN sejak era 1980-an. Di sektor global, negara-negara seperti Jepang dan Korea Selatan juga membentuk tim percepatan legalisasi aset untuk mencegah konf-

Lanjut ke Hal: 7

## Wali Kota Baubau HYF Resmi Buka Konsultasi Publik Penyusunan RKPD 2027, Prioritaskan Kemiskinan dan Pelestarian Budaya

hingga akademisi. Pemerintah menekankan bahwa penyusunan RKPD harus berangkat dari kebutuhan nyata masyarakat.

Dalam sambutannya, Yusran menyebutkan konsultasi publik memiliki peran strategis dalam mewujudkan proses perencanaan pembangunan yang partisipatif dan transparan. "Kami ingin memastikan setiap rencana benar-benar sejalan dengan aspirasi masyarakat," ujarnya di hadapan peserta forum.

RKPD 2027 diproyeksikan menjadi pedoman kunci dalam penyusunan program dan kegiatan pemerintah daerah, sekaligus mengawal pelaksanaan RPJMD 2025-2029. Dokumen ini mengatur prioritas pembangunan dan alokasi sumber daya yang akan menentukan arah pembangunan lima tahun ke depan.

Pada forum tersebut, Wali Kota Yusran juga mengajak semua pihak memperkuat kolaborasi lintas sektor. Ia menegaskan bahwa konsultasi publik tidak boleh dipandang sebagai acara

seremonial semata. "Ini ruang dialog terbuka. Masukan kritis dan ide inovatif sangat kami butuhkan," tegasnya.

Salah satu fokus utama dalam penyusunan RKPD 2027 adalah isu-isu fundamental seperti pengurangan kemiskinan, pengurangan angka pengangguran, peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta pelestarian budaya lokal. Pemkot menilai isu budaya penting karena Baubau memiliki warisan Kesultanan Buton yang menjadi bagian sejarah nasional.

Secara historis, mekanisme konsultasi publik dalam perencanaan pembangunan mulai diterapkan secara intensif di Indonesia pascareformasi 1998 seiring diperkuatnya prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan desentralisasi daerah. Secara global, praktik serupa telah lama diterapkan, seperti model public hearing di Amerika Serikat dan citizen participation forums di Uni Eropa sebagai bagian dari kebijakan pembangunan berorientasi mas-

yarakat.

Kepala Bapperida Kota Baubau, Moh. Abduh, turut menjelaskan bahwa forum ini merupakan bagian dari rangkaian panjang perencanaan pembangunan. Menurutnya, masukan masyarakat akan dipadukan dengan hasil Musrenbang kelurahan hingga kecamatan. "Setelah forum ini, masih ada FGD dan Musrenbang berjenjang," ungkapnya.

Abduh juga menegaskan bahwa penyusunan RKPD mengikuti siklus perencanaan tahunan yang telah ditetapkan secara nasional sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Dengan demikian, setiap pemerintah daerah memiliki mekanisme yang sama dalam menyelaraskan pembangunan daerah dan nasional.

Wali Kota Yusran berharap konsultasi publik ini menghasilkan rumusan kebijakan yang membawa manfaat nyata bagi masyarakat. "Tujuan akhirnya adalah kesejahteraan warga Baubau. Itulah inti dari setiap proses perencanaan," katanya dalam kutipan lain.

Ia juga menambahkan bahwa Kota Baubau harus terus memperkuat daya saing regional melalui inovasi pembangunan. Menurutnya, pengembangan sumber daya manusia, ekonomi kreatif, dan infrastruktur yang adaptif adalah kunci menghadapi perkembangan global.

Dalam penutupannya, pemerintah memastikan penyusunan RKPD 2027 ditargetkan rampung pada Mei 2026. Seluruh hasil forum ini akan dirangkum sebagai bagian dari rancangan awal RKPD sebelum memasuki pembahasan lanjutan dan penetapan resmi.

Pemerintah Kota Baubau menegaskan kembali komitmen untuk membuka ruang dialog luas dalam setiap tahapan perencanaan pembangunan. Dengan demikian, kebijakan yang dihasilkan diharapkan lebih inklusif, tepat sasaran, serta mencerminkan kebutuhan masyarakat di berbagai lapisan.\*

## Satgas Baru ATR/BPN dan Telkom Fokus Selesaikan Sengketa dan Sertifikasi Aset Tanah

lik pertanahan akibat perkembangan bisnis yang cepat. Langkah Telkom dan ATR/BPN ini dinilai sejalan dengan praktik internasional tersebut.

SKB ini ditandatangani oleh Dirjen Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah, Asnaedi, serta Dirjen Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan, Ilias Tedjo Prijono, dari pihak Telkom hadir Direktur Legal & Compliance, Andy Kelana, dan Direktur Keuangan & Manajemen Risiko, Arthur Angelo.

Satgas ini memiliki tugas utama mempercepat proses penyerpikan tanah milik Telkom, mencakup penerbitan sertipikat baru, pembaruan, perpanjangan, serta peningkatan hak atas tanah. Selain itu, Satgas juga diberi wewenang mendukung upaya penyelesaian sengketa pertanahan yang hingga kini masih terjadi di beberapa wilayah operasional Telkom.

Menurut Wamen Ossy, pendekatan kerja baru Satgas akan

membuat proses penanganan aset lebih terstruktur. "Dulu masing-masing regional mengurus ke Kantor Pertanahan daerahnya. Kalau sekarang lebih sistematis dan terpusat," ujarnya dalam sambutan.

Pembentukan Satgas yang berlaku hingga 19 Februari 2027 ini diharapkan meningkatkan efektivitas koordinasi serta mempercepat pengamanan aset. Wamen menekankan bahwa seluruh aset Telkom harus tersertifikatkan, terutama yang dapat diselesaikan tanpa proses peradilan.

Sejarah menunjukkan bahwa banayak aset vital perusahaan telekomunikasi dunia seperti AT&T di Amerika Serikat pernah menghadapi sengketa lahan yang menghambat pembangunan infrastruktur. Indonesia berupaya menghindari situasi serupa melalui kerja cepat dan sistematis seperti yang kini diterapkan Telkom dan ATR/BPN.

Direktur Utama Telkom, Dian Siswari, menyampaikan

apresiasinya atas dukungan pemerintah. "Satgas ini memungkinkan kita mengambil langkah berani dan inovatif," kata Dian. Ia menegaskan bahwa Telkom membutuhkan kepastian hukum atas aset untuk mendukung rencana pengembangan infrastruktur digital nasional.

Telkom yang memiliki aset tanah tersebar di berbagai daerah selama ini kerap menghadapi permasalahan administratif dan sengketa hak atas tanah akibat perubahan tata ruang dan dinamika pembangunan. Dengan adanya Satgas, penyelesaian permasalahan tersebut diharapkan berjalan lebih cepat dan konsisten.

Selain pejabat tinggi ATR/BPN, kegiatan pembentukan Satgas juga diikuti jajaran manajemen Telkom yang menyatakan komitmen untuk memberikan data, dukungan teknis, serta koordinasi menyeluruh selama masa kerja satu tahun. Kolaborasi lintas lembaga ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat tata kelola aset pertanahan nasional.\*

## IPA Wawoangi Siap Beroperasi, Bupati Buton Selatan Muh Adios Minta Penyediaan Listrik Dipercepat

Meski demikian, proses pengoperasian fasilitas tersebut belum dapat dilakukan sepenuhnya karena masih menunggu penyambungan jaringan listrik. Komponen listrik merupakan bagian vital dari operasional sistem pemompaan, pengolahan, dan distribusi air. "Kita berharap seluruh kebutuhan teknis, termasuk pasokan listrik, bisa segera dipenuhi agar layanan bisa berjalan," imbuhnya.

Menurut Adios, pemerintah daerah telah melakukan koordinasi dengan pihak terkait untuk mempercepat penyediaan energi listrik bagi instalasi tersebut. Ia menegaskan bahwa kehadiran IPA Wawoangi diharapkan dapat menjadi solusi kebutuhan air bersih masyarakat yang selama ini bergantung pada sumber alternatif yang sering tidak stabil.

Keberadaan IPA Wawoangi juga menjadi bagian dari pembangunan berkelanjutan sebagaimana ditunjukkan dalam Tujuan Pembangunan

Berkelanjutan (SDGs) poin keenam, yaitu memastikan ketersediaan air bersih dan sanitasi yang layak. Secara global, akses air bersih menjadi salah satu indikator kesejahteraan masyarakat yang terus didorong oleh berbagai organisasi internasional.

Secara historis, Indonesia juga pernah menghadapi tantangan pasokan air bersih dalam skala nasional, terutama di awal tahun 2000-an ketika perubahan iklim mulai memengaruhi kualitas sumber air di sejumlah daerah. Pemerintah kemudian memperluas pembangunan instalasi air bersih sebagai bagian dari program prioritas nasional.

Di tingkat internasional, negara-negara maju seperti Jepang dan Belanda telah lebih dulu menerapkan sistem pengolahan air modern yang dijadikan rujukan pembangunan infrastruktur air di banyak wilayah dunia, termasuk Indonesia. Keberhasilan

mereka menunjukkan pentingnya dukungan energi listrik dan teknologi yang stabil dalam mengoptimalkan layanan pengolahan air.

Adios berharap IPA Wawoangi dapat segera melayani masyarakat dalam beberapa waktu ke depan. Ia menekankan bahwa pemerintah tetap berkomitmen memastikan layanan dasar terus ditingkatkan sebagai bagian dari pembangunan daerah yang inklusif. "Kami ingin masyarakat segera merasakan manfaatnya. Air bersih adalah kebutuhan mendasar yang harus kita pastikan tersedia," kata Adios.

Dengan beroperasinya IPA Wawoangi nanti, masyarakat diharapkan tidak lagi mengalami kendala distribusi air bersih, terutama pada musim kemarau ketika kebutuhan air meningkat. Pemerintah daerah juga berencana memperluas jaringan distribusi untuk menjangkau lebih banyak wilayah.\*

## Dinas Pendidikan Buton Selatan Perketat Mekanisme PIP dan Hentikan Pembagian Merata

Kebudayaan, Riset, dan Teknologi untuk ditetapkan sebagai penerima melalui Surat Keputusan (SK). "Sekolah hanya mengusulkan, sementara penetapan sepenuhnya oleh kementerian," ujarnya.

PIP sendiri merupakan lanjutan dari kebijakan nasional perlindungan sosial di bidang pendidikan yang sudah berjalan sejak 2014. Program ini menjadi bagian dari strategi pengurangan angka putus sekolah, seperti halnya kebijakan serupa di sejumlah negara. Misalnya, Brasil dengan Bolsa Família dan Meksiko dengan Prospera, yang sama-sama menargetkan keluarga kurang mampu untuk melanjutkan pendidikan anak.

Secara historis, Indonesia juga telah

meluncurkan beberapa skema bantuan pendidikan sebelum PIP, di antaranya Bantuan Siswa Miskin (BSM) yang dimulai pada 1998 untuk mengatasi dampak krisis ekonomi Asia. Reformasi menuju PIP dilakukan untuk memperluas jangkauan dan meningkatkan akurasi data penerima melalui sistem digitalisasi pendidikan.

Di Buton Selatan, Dinas Pendidikan juga mengawasi tata kelola PIP terutama pada jenjang SD dan SMP. La Amiru menegaskan bahwa dinas bertugas melakukan sosialisasi, memastikan sekolah memahami prosedur, serta memonitor penyalurannya agar tidak terjadi penyimpangan.

Selain itu, ia menyoroti pentingnya peran sekolah

dalam membantu siswa, terutama di wilayah terluar seperti Kecamatan Batuatas, yang kerap menghadapi persoalan biaya transportasi saat proses aktivasi rekening. "Untuk daerah kepulauan, sekolah biasanya memfasilitasi agar tidak membebani orang tua," ujar Amiru.

Namun demikian, ia kembali mengingatkan bahwa sekolah dilarang melakukan pemotongan dana PIP dalam bentuk apa pun. Praktik pemotongan, bahkan atas dasar kesepakatan orang tua, tetap dianggap melanggar aturan. "Dana PIP harus diterima utuh oleh siswa karena digunakan untuk seragam, buku, dan kebutuhan belajar lainnya," katanya.

Ia menambahkan bahwa laporan mengenai pembagian

merata yang diterima dinas telah ditindaklanjuti melalui pembinaan langsung kepada sekolah bersangkutan. Edukasi mengenai pentingnya ketepatan sasaran dan transparansi kembali ditegaskan.

La Amiru berharap seluruh satuan pendidikan di Buton Selatan dapat mengikuti petunjuk teknis yang berlaku secara nasional. Menurutnya, disiplin dalam menyalurkan PIP akan berdampak langsung pada peningkatan kualitas pembelajaran dan mencegah terjadinya ketidakadilan di lingkungan sekolah.

"PIP adalah hak siswa yang ditetapkan oleh negara, bukan dana yang bisa dibagi berdasarkan kebiasaan," tutupnya.\*

## Lima Raperda Inisiatif Masuk Pembahasan DPRD Buton Selatan, Juga Mantapkan Agenda Legislasi dan Reses Dua Masa Sidang



### Laporan: Firman

BUTON SELATAN, DT -DPRD Kabupaten Buton Selatan sedang mempersiapkan penyelesaian berbagai agenda legislasi dan pengawasan pada masa sidang pertama dan kedua tahun berjalan. Sejumlah rancangan regulasi prioritas, langkah koordinasi lintas lembaga, serta kegiatan reses menjadi rangkaian program yang diproyeksikan memperkuat pelayanan publik di daerah.

Mekanisme masa sidang DPRD, yang berjalan tiga kali dalam setahun, telah lama menjadi fondasi sistem legislasi Indonesia sejak diberlakukan melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pola tiga masa sidang ini mengadopsi praktik lembaga legislatif modern di berbagai negara, termasuk Inggris dan Amerika Serikat, yang menggunakan periode sidang untuk mengukur efektivitas fungsi anggaran, legislasi, dan pengawasan.

Pada masa sidang pertama yang berlangsung empat bulan sejak pelantikan anggota dewan pada Oktober lalu, sejumlah agenda strategis tercatat telah dituntaskan.

Di antaranya pembahasan rancangan peraturan daerah (Raperda) terkait skema multi years pembangunan Kantor Bupati Buton Selatan yang sebelumnya sempat menjadi perhatian publik karena kebutuhan infrastruktur pemerintahan yang semakin mendasak.

Selain itu, kegiatan kunjungan kerja ke daerah pemilihan (dapil) turut dilakukan untuk menjangkau aspirasi masyarakat. Kunjungan ini menjadi bagian dari fungsi representasi yang secara historis telah menjadi ciri lembaga legislatif sejak masa parlemen modern Eropa pada abad ke-18.

Sekretaris DPRD La Ode Nurunani, menjelaskan bahwa seluruh agenda tersebut berjalan dengan pendekatan koordinatif. "Setiap tahapan yang kami laksanakan selalu dikaitkan dengan kebutuhan masyarakat. Karena itu, kunker dan serap aspirasi menjadi salah satu instrumen yang kami utamakan," ujarnya.

Fungsi pengawasan, menurut Nurunani, juga menjadi pekerjaan intensif selama masa sidang pertama. Sejumlah laporan masyarakat, terutama terkait pelaksanaan Program Indonesia Pintar (PIP),

seringkali menjadi isu yang disampaikan kepada lembaga legislatif. "Kami selalu mempertemukan pihak-pihak terkait agar tidak ada informasi yang simpang siur," katanya.

Dalam sejarah kebijakan nasional, PIP sendiri merupakan program yang diluncurkan sejak 2014 sebagai bagian dari agenda pemerataan akses pendidikan. Program serupa juga diterapkan di banyak negara, seperti Malaysia dan Filipina, untuk mendukung pendidikan masyarakat berprestasi rendah.

Nurunani menegaskan bahwa penyelesaian persoalan masyarakat dilakukan melalui pendekatan mediasi. "Hampir semua aduan bisa kita selesaikan secara elegan tanpa harus ada pihak yang saling menyalahkan," jelasnya.

Memasuki masa sidang kedua, Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) kini tengah mematangkan sejumlah Raperda inisiatif DPRD. Sedikitnya lima rancangan regulasi telah diusulkan untuk dibahas, meski penyusunan prioritas tetap mempertimbangkan kondisi keuangan daerah. "Kemampuan keuangan daerah menjadi acuan pent-

ing. Tidak semua usulan bisa langsung dibahas," tuturnya.

Dalam proses legislasi ini, DPRD bekerja sama dengan Kementerian Hukum dan HAM serta beberapa perguruan tinggi. Kolaborasi tersebut dilakukan mulai dari penyusunan naskah akademik hingga pembahasan melalui forum diskusi. Praktik ini mengikuti standar internasional yang menempatkan kajian akademik sebagai dasar utama pembuatan regulasi agar produk hukum lebih responsif dan berkualitas.

Pada masa sidang yang sama, DPRD juga dijadwalkan melaksanakan kegiatan reses sebagai bagian dari kewajiban anggota dewan. Reses tercatat telah menjadi mekanisme resmi di Indonesia sejak era reformasi, mengikuti pola kerja parlemen dunia yang menekankan kedekatan wakil rakyat dengan basis pemilih.

"Kegiatan reses wajib dilaksanakan sekali setiap masa sidang, dan ini menjadi ruang strategis untuk menyerap kebutuhan masyarakat secara langsung," pungkaskan Nurunani. (\*)

## DPR Desak Pembenahan DAS Morowali Usai Banjir Maut di Kawasan IMIP



DPR respons kebakaran maut di Morowali dan desak rehabilitasi DAS.

### Laporan: Alwan

JAKARTA, DT-Dorongan evaluasi tata kelola lingkungan di kawasan industri kembali menguat setelah banjir dan tanah longsor menewaskan satu pekerja di area PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP), Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah. Anggota Komisi IV DPR RI Rajiv menilai tragedi tersebut menjadi tanda bahaya serius bagi sistem pengelolaan daerah aliran sungai (DAS) di wilayah tambang dan pengolahan mineral.

Insiden longsor yang terjadi pada Rabu (18/2) itu menimpa sejumlah alat berat dan menyebabkan seorang pekerja kehilangan nyawa. Korban kemudian ditemukan tim SAR dan diserahkan kepada keluarga pada Kamis (19/2), menurut data dari BNPB.

Rajiv menegaskan bahwa kasus ini tak bisa dipandang sebagai bencana tunggal yang disebabkan cuaca semata. "Kalau sampai ada korban jiwa, itu artinya ada mata rantai pengawasan yang perlu ditelusuri kembali," ujarnya. Ia meminta pemerintah memperkuat pengawasan terhadap izin dan pengelolaan lingkungan di kawasan industri berat.

Menurutnya, kawasan seperti PT Indonesia Morowali Industrial Park yang menjadi pusat hilirisasi nikel nasional seharusnya memiliki mitigasi banjir yang komprehensif, mulai dari kapasitas drainase hingga penataan ruang wilayah tangkapan air. "Kawasan industri wajib memastikan sistem pengelolaan air berjalan efektif," kata dia.

Menyikapi kejadian

tersebut, Rajiv mendesak audit total terhadap kondisi DAS di Kabupaten Morowali. Audit itu mencakup identifikasi tambang aktif maupun bekas tambang yang belum direhabilitasi serta pemetaan lahan kritis yang memicu erosi. Ia juga meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mempublikasikan data terbaru mengenai kapasitas tampung air di wilayah tersebut.

Dorongan rehabilitasi DAS sebenarnya bukan isu baru. Sejak 2010, Indonesia telah menggiatkan program Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) setelah mencatat kerusakan daerah tangkapan air di berbagai provinsi. Secara internasional, persoalan serupa pernah menjadi sorotan global, seperti keruntuhan sistem DAS di tambang Brasil tahun 2019 yang menimbulkan korban jiwa dan memicu revisi kebijakan pertambangan dunia.

Rajiv mengingatkan bahwa kegagalan mengelola DAS bukan hanya berdampak pada kerusakan ekologis, tetapi juga langsung menyentuh keselamatan pekerja. "Kita tidak boleh menunggu korban berikutnya," ujarnya menegaskan. Ia meminta mitigasi banjir diprioritaskan mengingat Morowali masuk wilayah rawan hujan ekstrem.

Ia juga menyoroti kewajiban rehabilitasi hutan dan lahan oleh pelaku industri. Menurutnya, perusahaan yang menikmati manfaat ekonomi dari hilirisasi harus memiliki tanggung jawab ekologis yang jelas. "Industri di hilir tidak bisa lepas tangan dari kondisi hulu," ucapnya.

Selain penguatan regulasi, Rajiv men-

gusulkan penggunaan sistem pemantauan terpadu berbasis satelit dan sensor hidrologi. Teknologi serupa telah digunakan di beberapa negara seperti Jepang dan Korea Selatan untuk memantau lonjakan debit air secara real time. "Dengan dukungan teknologi, potensi lonjakan debit bisa diprediksi lebih dini," katanya.

Tragedi IMIP menurut Rajiv harus menjadi momentum evaluasi terhadap keselamatan kerja di sektor industri berbasis sumber daya alam. Ia menekankan bahwa hilirisasi memang penting bagi ekonomi nasional, tetapi keselamatan pekerja dan keberlanjutan lingkungan tidak boleh dikorbankan.

Ia juga meminta perusahaan memastikan seluruh hak keluarga korban terpenuhi tanpa prosedur berbelit. "Tanggung jawab moral dan hukum harus ditegakkan," ujarnya. Hal ini sesuai prinsip perlindungan pekerja dalam standar keselamatan global.

Insiden Morowali ini menambah daftar kejadian bencana di kawasan pertambangan Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Sejak 2018, setidaknya lima bencana hidrometeorologi tercatat terjadi di sekitar area industri ekstraktif, sebagian besar dipicu kerusakan vegetasi dan buruknya tata kelola air.

Dengan meningkatnya intensitas hujan ekstrem akibat perubahan iklim, Rajiv menilai koordinasi lintas kementerian perlu diperkuat untuk memastikan setiap kawasan industri memiliki ketahanan ekologis memadai. "Kalau rehabilitasi DAS diabaikan, kita sedang menabung risiko," tutupnya. (\*)

## Ramadan Sultra Fest 2026 Resmi Bergulir, Sinergi Pemprov - BI - Bank Sultra Warnai Pembukaan, Hidupkan Ekonomi dan Religi Kendari



### Laporan: Lisna

SULTRA, BP, Ramadan Sultra Fest 2026 resmi dimulai melalui seremoni soft launching yang digelar di Pelataran MTQ Kota Kendari, Sabtu (21/2/2026). Acara ini dibuka oleh Edwin Permadi bersama Andri Permana Diputra Abubakar, menandai kolaborasi besar antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, Bank Indonesia, dan Bank Sultra dalam menyambut bulan suci Ramadan.

Gelaran Ramadan Sultra Fest digagas sebagai agenda tahunan yang berfokus pada pemberdayaan ekonomi masyarakat, khususnya UMKM, sekaligus memperkuat literasi keuangan digital. Model festival serupa sebelumnya telah sukses diterapkan di beberapa negara berpenduduk muslim besar, seperti Malaysia dan Uni Emirat Arab, yang menjadikan festival Ramadan sebagai sarana penggerak ekonomi malam hari.

Dalam konteks nasional, kegiatan ini melanjutkan tren pertumbuhan festival Ramadan di Indonesia yang sejak 2019 meningkat signifikan setelah munculnya transaksi digital berbasis QRIS sebagai standar pembayaran

nasional. Sejak diluncurkan Bank Indonesia pada 17 Agustus 2019, QRIS kini telah digunakan lebih dari 30 juta merchant di seluruh Indonesia.

Pada soft launching tahun ini, Bank Sultra dan Bank Indonesia Sulawesi Tenggara menegaskan komitmen bersama dalam menggerakkan ekonomi lokal. Tidak hanya menyediakan area UMKM, festival ini juga menghadirkan beragam fasilitas edukatif yang mendukung literasi keuangan dan keagamaan.

Direktur Utama Bank Sultra, Andri Permana Diputra Abubakar, menilai Ramadan Sultra Fest sebagai ruang kolaboratif yang memberi dampak langsung bagi masyarakat. "Kami ingin menghadirkan kegiatan yang produktif dan positif selama Ramadan. Soft launching ini awal dari rangkaian besar menuju grand launching akhir Februari," ujarnya.

Festival ini menghadirkan 30 tenant UMKM yang seluruhnya telah mendukung transaksi digital melalui QRIS. Penggunaan QRIS menjadi bagian dari strategi mendorong pembayaran nontunai selama Ramadan, peri-

ode yang biasanya mengalami lonjakan perputaran uang di masyarakat.

Berbagai perlombaan bernuansa religi juga menjadi daya tarik bagi pengunjung, mulai dari lomba lagu religi, lomba adzan, hingga hafalan surat pendek. Bahkan, panitia menyediakan lomba melukis QRIS sebagai inovasi edukatif yang menyasar generasi muda. Hal ini mencerminkan upaya menggabungkan nilai spiritual dengan literasi digital secara kreatif.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sultra, Edwin Permadi, turut memberikan apresiasi terhadap sinergi antarinstansi. "Kolaborasi ini bukan hanya soal festival, melainkan ikhtiar bersama mendorong ekonomi daerah, mengedukasi masyarakat, dan memperkuat program sosial seperti Pojok Halal dan Pojok Wakaf," ungkapnya.

Selain itu, Bank Sultra memberikan berbagai promo selama festival, termasuk cashback transaksi, hadiah bagi tenant dengan volume QRIS tertinggi, serta pembagian 50 paket makanan gratis setiap hari bagi masyarakat yang membutuhkan. Upaya ini sejalan dengan

tradisi berbagi yang identik dengan bulan suci.

Lebih jauh, Bank Indonesia merencanakan penyelenggaraan gerakan pasar murah sebagai langkah pengendalian inflasi. Program serupa terbukti efektif pada Ramadan tahun-tahun sebelumnya, terutama dalam menjaga stabilitas harga pangan dan memastikan keterjangkauan barang kebutuhan pokok.

Kemeriahan pembukaan semakin lengkap berkat partisipasi Apkulindo Sulawesi Tenggara dan para santri penghafal Al-Qur'an, yang memberikan nuansa religius dalam suasana festival. Kehadiran mereka sekaligus menegaskan bahwa Ramadan Sultra Fest tidak hanya berfokus pada ekonomi, tetapi juga penguatan nilai budaya dan spiritual masyarakat.

Seremoni soft launching ditutup dengan pembukaan simbolis oleh kedua pimpinan lembaga, menandai dimulainya rangkaian Ramadan Sultra Fest 2026 yang akan berlangsung hingga 15 Maret 2026. Grand launching dijadwalkan dihadiri langsung oleh Gubernur Sulawesi Tenggara. (\*)

## Gubernur Sultra ASR Apresiasi Evaluasi BPK untuk Penguatan Kebijakan Ketahanan Pangan



### Laporan: Mashuri

SULTRA, BP- Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara menyatakan komitmennya dalam memperkuat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran melalui tindak lanjut hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Sulawesi Tenggara terkait kinerja strategi ketahanan pangan tahun anggaran 2020 hingga semester I 2025. Pernyataan tersebut disampaikan dalam penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang berlangsung di Kendari, Senin (23/2/2026).

Penyerahan laporan itu menjadi momentum penting bagi pemerintah daerah untuk kembali menegaskan orientasi pembangunan yang terarah, khususnya pada sektor pangan. Laporan tersebut mencerminkan hasil evaluasi menyeluruh atas desain strategi dan kebijakan pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas pasokan, tata kelola distribusi, serta efektivitas program pangan selama lima tahun terakhir.

Gubernur Sulawesi Tenggara, Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka, melalui sambutan yang dibacakan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara, Drs. H. Asrun Lio., M.Hum., Ph.D, menyampaikan penghargaan atas kerja pengawasan yang dilakukan BPK. Menurutnya, rekomendasi lembaga pemeriksa menjadi dasar kuat bagi pemerintah daerah untuk mempercepat perbaikan pada aspek strategis maupun teknis.

"BPK sebagai mitra kerja kami senantiasa memberikan arahan, evaluasi, dan pengawasan agar kinerja pemerintah daerah semakin optimal,"

ujar Sekda membacakan pesan Gubernur. Ia menambahkan bahwa seluruh rekomendasi akan ditindaklanjuti secara bertahap sesuai ketentuan.

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur juga menyoroti pentingnya peningkatan kualitas strategi pembangunan pangan. Ia menilai bahwa ketahanan pangan tidak hanya sekadar program sektoral, tetapi merupakan pondasi pembangunan yang menentukan stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat daerah. "Kami berharap hasil pemeriksaan ini mendorong jajaran pemerintah provinsi semakin responsif terhadap kebutuhan masyarakat," kata Sekda.

Acara yang dihadiri Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara serta sejumlah pimpinan OPD itu juga menjadi ruang konsolidasi bagi pemerintah daerah untuk mengevaluasi kinerja lintas sektor. Evaluasi tersebut dinilai penting mengingat tantangan pangan semakin kompleks, baik dari sisi produksi maupun distribusi.

Sejumlah negara di dunia juga pernah menghadapi tantangan serupa. Krisis pangan global tahun 2007-2008 misalnya, memperlihatkan bagaimana negara yang tidak memiliki strategi ketahanan yang matang mengalami lonjakan harga dan penurunan stok pangan. Indonesia sendiri pada tahun-tahun tersebut melakukan cadangan beras nasional sebagai langkah stabilisasi.

Di tingkat nasional, pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai pembenahan pada sektor pangan, termasuk melalui pembentukan Badan Pangan Nasional pada 2021 sebagai respons terhadap dinamika global dan kebutuhan pengawasan terpadu pada

rantai distribusi pangan. Pengalaman ini turut menjadi referensi penting bagi daerah dalam membangun sistem ketahanan pangan yang kokoh.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara menilai sejarah tersebut dapat menjadi acuan dalam perumusan strategi jangka panjang. Evaluasi BPK dianggap sebagai salah satu instrumen yang memastikan bahwa kebijakan berjalan pada jalur yang tepat dan selaras dengan kebutuhan pembangunan.

Ketua DPRD Sulawesi Tenggara dalam kesempatan ini menyampaikan dukungan penuh terhadap upaya pemerintah daerah dalam memperbaiki tata kelola anggaran. Ia menegaskan bahwa sinergi legislatif dan eksekutif sangat dibutuhkan untuk mendorong pencapaian target pembangunan. "Kami akan memastikan bahwa rekomendasi BPK tidak berhenti menjadi laporan, tetapi diwujudkan dalam tindakan nyata," ujarnya.

Di akhir acara, Sekda menegaskan kembali tekad pemerintah provinsi untuk terus memperbaiki perencanaan dan implementasi kebijakan pangan. Ia menilai bahwa pemeriksaan berkala semacam ini mampu memperkuat komitmen pemerintah dalam menjaga akuntabilitas publik.

Dengan semakin berkembangnya tantangan global terkait pangan, pemerintah provinsi berharap hasil pemeriksaan ini menjadi penguat dalam merumuskan kebijakan yang tepat sasaran. Tindak lanjut dari rekomendasi BPK akan disusun dalam rencana aksi yang terukur guna memastikan hasil evaluasi benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat Sulawesi Tenggara. (\*)

## 1.000 Paket Sembako Disalurkan pada Buka Puasa Bersama Pemkab Buton Tengah di Ramadan 1447 H



Laporan: Ardi

BUTON TENGAH, BP.— Pemerintah Kabupaten Buton Tengah menggelar acara buka puasa bersama yang dirangkaikan dengan pembagian 1.000 paket sembako bersubsidi kepada masyarakat dua kelurahan di Kecamatan Lakudo, Jumat (20/2/2026). Kegiatan berlangsung di pelataran Rumah Jabatan Bupati dan dihadiri sejumlah pejabat daerah serta tokoh masyarakat.

Momentum kebersamaan ini berlangsung pada hari kedua Ramadan 1447 Hijriah. Kegiatan tersebut menjadi langkah awal pemerintah daerah dalam memastikan kebutuhan dasar masyarakat tetap terpenuhi di tengah kebijakan efisiensi anggaran tahun berjalan.

Bupati Azhari menyampaikannya bahwa meski kemampuan fiskal daerah mengalami pengetatan, pemerintah tetap berupaya menjaga kehadiran negara di tengah masyarakat. Menurutnya, prioritas saat ini bukan hanya pengendalian anggaran, tetapi memastikan warga tidak terdampak secara langsung.

“Kami harus tetap hadir. Walaupun anggaran terbatas, bantuan sembako adalah bentuk komitmen pemerintah,” ujarnya.

Acara tersebut juga dihadiri Wakil Bupati Muh. Adam Basan, anggota DPRD, para kepala OPD, tokoh agama, serta ratusan warga dari Kelurahan Gu Timur dan Lakudo yang menjadi penerima paket subsidi.

Adapun paket yang disalurkan berisi lima kilogram beras, satu kilogram gula pasir, dan minyak goreng. Paket tersebut dapat ditebus warga dengan harga Rp60.000 per paket melalui program subsidi yang turut bekerja sama dengan Baznas.

Program ini merupakan bagian dari upaya menekan beban ekonomi masyarakat selama Ramadan yang menurut berbagai riset nasional, biasanya mengalami kenaikan harga komoditas pokok.

Bupati Azhari menambahkan bahwa meski fiskal mengalami pengetatan, Kabupaten Buton Tengah tetap berada dalam kondisi sehat secara keuangan daerah. “Kami tegaskan bahwa Buton Tengah tidak memiliki utang daerah. Ini penting agar pembangunan tetap stabil,” katanya.

Dalam beberapa kesempatan, pemerintah daerah terus menjalin koordinasi dengan pemerintah pusat di Jakarta untuk memperjuangkan sejumlah proyek strategis. Program yang diusulkan meliputi pembangunan

Batalyon, kantor BPS, kantor BPN, Pengadilan Agama, rencana Pengadilan Negeri, serta kantor dan gudang Bulog sebagai fasilitas pendukung cadangan pangan.

Di sektor pendidikan, Pemkab Buton Tengah mendapat alokasi Program Sekolah Rakyat (SR) dengan nilai lebih dari Rp250 miliar pada tahun 2026. Alokasi tersebut diperuntukkan bagi sekitar 1.080 siswa yang berasal dari keluarga desil 1 dan 2 sebagai bentuk pemerataan pendidikan nasional.

Selain program pendidikan, pemerintah juga tengah mengusulkan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih yang mencakup bantuan perahu, SPBN, rumah nelayan, serta dukungan kredit lunak bagi koperasi. Program ini sejalan dengan kebijakan nasional yang sejak 2014 menempatkan sektor kelautan sebagai pilar pembangunan ekonomi.

Di bidang investasi, Pemkab Buton Tengah membuka peluang kerja sama budidaya lobster, kepiting rajungan, dan ikan teri. Beberapa investor luar negeri dijadwalkan berkunjung usai Lebaran untuk meninjau potensi kelautan dan lahan keramba di berbagai teluk. Hal ini mencerminkan tren global pengem-

bangunan maritim yang turut memberi dampak pada wilayah pesisir Indonesia.

Pemerintah daerah juga mengusulkan pembentukan Kampung Migran Indonesia di Boneage serta kawasan kampung budaya yang berfungsi melestarikan benteng bersejarah dan menjaga ketahanan pangan lokal. Upaya ini sejalan dengan gerakan internasional pelestarian warisan budaya yang telah banyak diterapkan di berbagai negara.

Dalam rangkaian kegiatan, pemerintah menyerahkan Surat Keputusan (SK) kepada Pengawas Madrasah Diniyah Takmiliah, guru ngaji, dan tim dakwah se-kabupaten. Penyerahan SK ini disebut sebagai bentuk perhatian pemerintah terhadap penguatan pendidikan keagamaan.

“Pengabdian guru ngaji dan tim dakwah tidak boleh diabaikan. Mereka bagian dari fondasi moral masyarakat,” tutur Bupati Azhari.

Acara ditutup dengan tausiyah menjelang berbuka yang disampaikan oleh Ustaz H. Mansur Hasan Basri. Kehadiran warga yang memdati lokasi kegiatan mencerminkan antusiasme masyarakat menyambut Ramadan tahun ini. (\*)

## Buton Selatan, Buton, dan Muna Jadi Lokasi Pembangunan Kantor Pelayanan Haji dan Umrah Mulai 2026



Laporan: Firman

SULTRA, DT - Upaya pemerataan layanan haji dan umrah di Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) kembali diperkuat dengan rencana pembangunan tiga Kantor Pelayanan Haji dan Umrah (Pelhut) yang dijadwalkan mulai pada 2026. Pembangunan fasilitas tersebut ditempatkan di Kabupaten Muna, Kabupaten Buton, dan Kabupaten Buton Selatan, sebagai langkah meningkatkan akses layanan bagi masyarakat.

Langkah ini memperkuat konsistensi pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanan haji sejalan dengan kebijakan nasional. Komitmen ini bukan hanya merespons kebutuhan jamaah di daerah, tetapi juga merupakan bagian dari reformasi layanan yang telah berlangsung sejak perubahan besar penyelenggaraan haji dunia pada dekade 1990-an.

Plt. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Sulawesi Tenggara, H. Muhammad Lalan Jaya, menjelaskan bahwa pembangunan fasilitas layanan terus menjadi prioritas. Ia menegaskan bahwa Kemenag berupaya memastikan seluruh kabupaten dan kota dapat menikmati fasilitas pelayanan yang memadai.

“Tahun ini insyaallah akan dibangun tiga Pelhut, yaitu di Muna, Buton, dan Buton Selatan. Dengan tambahan ini, dari 17 daerah di Sulawesi Tenggara, sudah 12 yang memiliki fasilitas layanan,” ujarnya saat diwawancarai Minggu (15/2/2026).

Sebelum rencana pembangunan tersebut

disusun, pemerintah pusat dan daerah telah melakukan evaluasi kebutuhan layanan haji, termasuk meninjau pertumbuhan jumlah jamaah dalam 10 tahun terakhir. Secara nasional, peningkatan jamaah haji dan umrah terus terjadi sejak 2014, seiring kebijakan Arab Saudi yang membuka kuota lebih besar setelah renovasi Masjidil Haram selesai pada 2013.

Di Sulawesi Tenggara sendiri, distribusi fasilitas Pelhut sebelumnya belum merata. Beberapa daerah, seperti Buton Selatan, masih harus menggunakan gedung sewa untuk operasional layanan. Kondisi tersebut, kata Lalan, menjadi salah satu alasan utama percepatan pembangunan.

“Kami berharap pada 2027 seluruh layanan di Busel sudah dapat dipindahkan ke kantor baru yang lebih representatif,” ungkapnya.

Selain pembangunan tahun 2026, Kemenag juga menargetkan pembangunan empat Pelhut tambahan pada 2027. Lokasi yang diusulkan meliputi Kabupaten Buton Tengah, Konawe Kepulauan, Konawe Utara, serta satu daerah lain yang masih dalam proses penetapan berdasarkan kebutuhan.

Dengan proyeksi tersebut, pemerintah menetapkan target bahwa seluruh kabupaten/kota di Sulawesi Tenggara sudah memiliki kantor Pelhut paling lambat pada 2028. Target ini sejalan dengan upaya pemerintah pusat memperluas pemerataan layanan publik sesuai visi pelayanan berbasis wilayah.

Secara historis, layanan haji di Indonesia mengalami transformasi signifikan sejak pembentukan

Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah pada 2006. Perubahan itu memberikan ruang lebih luas bagi pengembangan kantor layanan di daerah, termasuk dalam soal administrasi, bimbingan manasik, hingga pengelolaan keberangkatan jamaah.

Lalan juga menambahkan bahwa proses pembangunan diharapkan dapat berjalan cepat. “Proses lelang perencanaan kami targetkan dimulai Maret. Jika seluruh dokumen lengkap, pembangunan bisa dimulai pada Mei,” tuturnya.

Hingga kini, masih terdapat delapan daerah di Sulawesi Tenggara yang belum memiliki kantor Pelhut. Dengan terealisasinya pembangunan tiga unit pada 2026, jumlah tersebut akan berkurang menjadi lima.

Jika empat kantor tambahan pada 2027 dapat direalisasikan sesuai rencana, hanya satu daerah yang akan tersisa tanpa fasilitas tersebut. Kondisi ini diharapkan menjadi titik awal pemerataan layanan haji secara menyeluruh.

Menurut Lalan, pembangunan kantor layanan di tiap daerah akan memberikan dampak besar terhadap efisiensi operasional. “Kami ingin masyarakat memperoleh pelayanan yang lebih mudah, cepat, dan optimal. Ini bagian dari komitmen kami untuk meningkatkan kualitas layanan,” tegasnya.

Dengan langkah bertahap dan terukur, pemerintah optimistis bahwa peningkatan fasilitas layanan haji dan umrah dapat memberikan pengalaman pelayanan yang lebih baik bagi jamaah, baik dalam proses administrasi maupun pemenuhan kebutuhan sebelum keberangkatan. (\*)

## Kemenkes Percepat Kedokteran Presisi Lewat BGSi untuk Tekan Lonjakan Biaya Kesehatan



JAKARTA, BP-Pemerintah Indonesia mempercepat implementasi kedokteran presisi melalui program Biomedical and Genome Science Initiative (BGSi) sebagai langkah strategis menekan pembiayaan kesehatan yang terus meningkat akibat penyakit kronis. Program ini dipertegas dalam Forum Komunikasi Strategis Nasional BGSi Ecosystem Roadshow yang berlangsung di Auditorium Leimena, Kementerian Kesehatan, Jakarta, Kamis (12/2).

Pada forum tersebut, Menteri Kesehatan Budi G. Sadikin menjelaskan bahwa pemanfaatan teknologi genomik menjadi fondasi baru bagi layanan kesehatan nasional. Melalui pengembangan data genetik individu, pengobatan di masa depan akan diarahkan pada pendekatan yang lebih akurat, presisi, dan efisien.

Menurut Menkes, transformasi ini menandai pergeseran dari model layanan konvensional yang selama puluhan tahun memakai prinsip "satu obat untuk semua" menuju pola terapi yang sangat diperson-

alisasi. "Pemeriksaan kesehatan kita kini dapat dilakukan jauh lebih akurat dan personal. Dengan begitu, pengobatan bisa lebih tepat sasaran dan efektif," ujarnya.

Hingga awal tahun 2026, BGSi telah merekrut lebih dari 20.000 partisipan dan berhasil menghasilkan 16.000 whole genome sequence manusia. Selain menjadi terobosan riset, capaian ini dianggap sebagai pijakan kuat untuk mengoptimalkan belanja negara di sektor kesehatan melalui pencegahan diagnosa yang keliru dan terapi yang tidak tepat.

Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas, Febrina Alphyanto Ruddyard, menggarisbawahi bahwa kebijakan berbasis genomik memiliki dampak langsung terhadap ketahanan fiskal. Ia menilai bahwa pendekatan presisi akan mencegah pengobatan berulang yang memakan biaya besar. "Jika terapinya tepat, pemborosan biaya pengobatan bisa dihindari. Keuangan negara akan menjadi jauh lebih efektif," tegasnya.

Namun Febrina

mengingatkan bahwa pengembangan ekosistem genomik bukan proyek jangka pendek. Ia menyebutnya sebagai "lari maraton" yang membutuhkan konsistensi teknologi, sumber daya manusia mumpuni, dan komitmen pendanaan yang berkelanjutan.

Dukungan juga datang dari Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Luhut Binsar Panjaitan, yang menilai bahwa inisiatif genomik tidak boleh berhenti pada ranah medis. Menurutnya, pemanfaatan data genetik dapat diterapkan untuk mengoptimalkan keanekaragaman hayati Indonesia guna memperkuat ketahanan pangan dan ekonomi. "Potensi sumber daya genetik kita harus dikelola secara optimal," katanya.

Dari sisi infrastruktur, implementasi BGSi saat ini telah ditopang oleh 10 rumah sakit yang berfungsi sebagai hubs genomik nasional. Keberadaan jejaring ini diharapkan mempercepat pengembangan layanan genomik hingga ke daerah serta memperluas manfaat kedokteran presisi bagi masyarakat.

Dalam konteks historis, Indonesia mulai mengembangkan riset genetika sejak

era 1980-an melalui berbagai laboratorium universitas, tetapi pengumpulan data berskala nasional baru dimulai pada dekade terakhir. Secara internasional, penerapan kedokteran presisi lebih dahulu berkembang di Amerika Serikat setelah diluncurkannya Precision Medicine Initiative pada 2015, diikuti Inggris melalui UK Biobank yang kini memiliki lebih dari 500.000 sampel genomik.

Kemajuan global tersebut menjadi pembandingan bagi Indonesia untuk memperkuat kapasitas riset dan layanan genomik agar mampu bersaing dalam peta kesehatan internasional. Dengan integrasi teknologi dan kebijakan yang lebih presisi, pemerintah berharap sistem kesehatan nasional dapat lebih tangguh, mandiri, dan berorientasi pada pencegahan.

Ke depan, data genomik yang dikumpulkan melalui BGSi diproyeksikan menjadi pilar utama dalam pengembangan layanan kesehatan berbasis digital. Selain mendukung klinis, data ini juga berperan strategis dalam penelitian penyakit, pengembangan obat, hingga penguatan keamanan biologis nasional. (\*)

## RI Mantapkan Konsorsium Genomik Nasional untuk Percepat Kedokteran Presisi

JAKARTA, BP-Pemerintah Indonesia mendorong pembentukan konsorsium genomik nasional sebagai strategi memperkuat penelitian berbasis data genetik dan mempercepat penerapan kedokteran presisi. Dorongan ini menjadi tonggak baru bagi ekosistem bioteknologi kesehatan nasional yang selama satu dekade terakhir berkembang pesat.

Langkah ini menuai dalam Forum Komunikasi Strategis Nasional bertajuk BGSi Ecosystem Roadshow yang digelar di Auditorium Leimena, Kementerian Kesehatan, Jakarta, Kamis (12/2). Pertemuan tersebut mempertemukan para pemangku kepentingan dari perguruan tinggi, lembaga riset, industri, dan rumah sakit pendidikan untuk menyatukan arah riset genomik di tanah air.

Menteri Pendidikan Tinggi dan Sains, Brian Yulianto, menegaskan bahwa penelitian genomik tidak dapat lagi berjalan sendiri-sendiri. Ia menilai kerja kolaboratif mutlak diperlukan karena riset ini menuntut integrasi sumber daya, teknologi, serta keahlian multidisiplin.

"Konsorsium ini harus menjadi platform strategis yang menyatukan seluruh aktor riset agar bergerak dalam satu ekosistem," kata Brian. Ia menambahkan bahwa sinergi tersebut akan memperkuat kemampuan nasional mengelola data berskala besar sekaligus mengoptimalkan penggunaan fasilitas riset.

Di sisi lain, Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional, Arif Satria, menilai bahwa penyediaan fasilitas penelitian berstandar tinggi menjadi kun-

ci agar riset genomik dapat berkembang merata. BRIN telah membuka akses penggunaan laboratorium untuk berbagai institusi yang selama ini terbatas oleh biaya pengadaan instrumen genomik.

"BRIN membuka kolaborasi seluas-luasnya agar fasilitas high-end dapat digunakan bersama," tegas Arif. Ia menjelaskan bahwa model pemanfaatan fasilitas bersama ini lazim diterapkan di negara-negara maju untuk menekan biaya riset dan meningkatkan produktivitas ilmiah.

Sementara itu, Menteri Kesehatan Budi G. Sadikin menilai pengembangan riset genomik akan membawa perubahan besar dalam praktik kesehatan nasional. Ia menekankan pentingnya pemahaman genom untuk diagnosis penyakit secara lebih cepat dan akurat.

"Pemahaman genom membuat kita mampu mengetahui cara mengobati secara presisi ketika penyakit muncul," ujar Budi. Menurutnya, pendekatan ini akan menggeser cara kerja sistem kesehatan Indonesia menuju model prediktif-preventif yang lebih efisien.

Secara historis, riset genomik dunia mengalami lonjakan besar sejak penyelesaian Human Genome Project (HGP) pada 2003, proyek internasional yang memetakan seluruh urutan DNA manusia. HGP membutuhkan waktu 13 tahun, namun kini teknologi sekuensing genom dapat dilakukan jauh lebih cepat dan murah, membuka peluang besar bagi negara berkembang seperti Indonesia.

Di tingkat nasion-

al, Indonesia mulai mengakselerasi riset genomik sejak pandemi Covid-19 yang mendorong penguatan whole genome sequencing untuk pemantauan varian virus. Pengalaman tersebut menjadi fondasi awal pembentukan ekosistem Biomedical Genome Science Initiative (BGSi) yang kini diarahkan pada penyakit tidak menular.

BGSi menetapkan beberapa fokus prioritas, antara lain stroke, penyakit jantung, dan kanker payudara. Ketiga penyakit tersebut merupakan penyumbang angka kematian tertinggi di Indonesia dan secara global, sehingga data genomiknya penting untuk menentukan terapi yang lebih spesifik.

Penerapan riset genomik juga akan memperkuat kebijakan kesehatan publik berbasis data. Dengan memanfaatkan integrasi data multidisiplin "mulai dari biologi molekuler, kimia, matematika, hingga kecerdasan artifisial" Indonesia diharapkan mampu mengembangkan solusi medis yang lebih efektif dan efisien.

Forum ini menjadi tonggak awal konsolidasi lintas sektor yang melibatkan Kementerian Kesehatan, Kemdiknas, BRIN, perguruan tinggi, rumah sakit, dan mitra industri. Pemerintah optimistis model konsorsium dapat mempercepat ketersediaan data genomik nasional dalam mendukung kebijakan kesehatan jangka panjang.

Dengan percepatan pembangunan ekosistem genomik, Indonesia menargetkan diri mampu berkompetisi secara global dalam pengembangan inovasi biomedis, sekaligus memastikan layanan kesehatan yang lebih tepat sasaran berbasis kedokteran presisi. (A1)

<p><b>PT FAREN GRAFIKA</b></p> <p>Harian Pagi <b>Baubau Post</b></p> <p><b>KRITIK, LUGAS, DAN INDEPENDEN</b></p> <p>Wartawan Baubau Post tidak menerima imbalan dalam bentuk apapun dalam melakukan tugas jurnalistik</p> <p>Dalam Pelaksanaan Tugas, Wartawan Baubau Post dibekali tanda pengenal. Untuk itu, masyarakat yang mencurigai seseorang yang mengatasnamakan Baubau Post, segera menghubungi Kantor Redaksi Surat Kabar Baubau Post</p> <p>Segala berita yang diterbitkan oleh Baubau Post meruokan tanggung jawab penanggungjawab redaksi</p>	<p>Pemimpin Umum: Fauzan NWA Penanggungjawab/Pemimpin Redaksi: Ardi Redpel: Prasetyo Korlip: Firman Redaktur: Kasrun, Rahim Reporter: Mashuri, Lisna, Asis, Hafid, Amat Jr, Noval</p>	<p>Layouter: Ririn Pracetak: Aditya Cetak: Jamaludin</p>	<p>Penerbit: PT FAREN GRAFIKA Komisaris: Erna Agule Direktur Utama: Andina Latief Manager Keuangan: Nabila DAA Manager Iklan &amp; Pemasaran: Jamaluddin Kepala Sirkulasi: Robi Administrasi: Salvana</p>	<p>Kepala Biro Wakatobi: Risman Kepala Biro Buton Utara: Kasrun Kepala Biro Buton: Rahim Kepala Biro Buton Selatan: Firman Kepala Biro Buton Tengah: Komarudin Kepala Biro Sultra: Masuri</p> <p>Agen Baubau: Jamaluddin Agen Buton Selatan: Firman Agen Buton: Samrihan Agen Buton Utara: Kasrun</p> <p>Harga dan Langganan: Dalam Kota Baubau 100.000/bulan, Luar Kota Baubau + Ongkos Kirim Eceran dalam Kota Baubau Rp 5000/eks</p>
<p>Alamat Redaksi/Tata usaha: Jalan Raya Palagimata (BTN Lipu Morikana) Blok K Nomor 01 Kelurahan Lipu, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara Tlp 0402-2014287- Email: baubaupost2019@gmail.com, ardiandina7786@gmail.com</p> <p>Percetakan: PT Faren Grafika, Alamat: Jalan Raya Palagimata (BTN Lipu Morikana) Blok K Nomor 01 Kelurahan Lipu, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara</p>				

## Penyidikan DJKA Berlanjut, KPK Panggil Budi Karya sebagai Saksi



KPK panggil eks Menteri Perhubungan Budi Karya terkait kasus korupsi DJKA

### Laporan: Amran

J A K A R T A , BP-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan perlunya pemeriksaan terhadap mantan Menteri Perhubungan periode Presiden ke-7 RI, Budi Karya Sumadi, sebagai saksi dalam penyidikan kasus dugaan korupsi proyek perkeretaapian di Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA). Pemanggilan yang dijadwalkan pada Rabu, 18 Februari 2026, tidak dihadiri oleh Budi.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebelumnya telah menjatuhkan hukuman 5 tahun penjara kepada mantan Direktur Prasarana Perkeretaapian, Harno Trimadi, terkait pemberian suap senilai total Rp3,2 miliar. Putusan tersebut disertai denda Rp200 juta subsider empat bulan kurungan serta kewajiban membayar uang pengganti.

Dalam kasus yang sama, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) DJKA, Fadliansyah, juga divonis empat tahun penjara dan denda Rp200 juta dengan kewajiban membayar uang pengganti Rp625 juta. Putusan hukum itu menjadi salah satu landasan bagi penyidik untuk mendalami pihak-pihak lain yang dianggap mengetahui proses pengaturan proyek.

KPK menegaskan bahwa penyidikan tidak hanya berhenti pada pelaku teknis. "Dalam perkara ini tentu dibutuhkan keterangan pejabat yang saat itu memiliki tanggung jawab struktural. Itu termasuk Pak BKS," ujar Juru

Bicara KPK, Budi Prasetyo, dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih, Jakarta, Senin (23/2).

Sebelumnya, lembaga antirasuah telah menetapkan sejumlah tersangka dari lingkungan DJKA dan perusahaan milik negara yang terlibat dalam pengondisian proyek. Mereka antara lain Bernard Hasi-buan, Putu Sumarjaya, serta pejabat PT KA Manajemen Properti, Yoseph Ibrahim dan Parjono.

Keterangan Budi Karya dibutuhkan untuk melengkapi berkas perkara Harno Trimadi, terutama mengenai proyek jalur kereta di Jawa Timur. KPK ingin mendalami dugaan pengondisian pemenang proyek serta aliran dana yang melibatkan pihak-pihak di lingkungan Kementerian Perhubungan.

Salah satu fokus penyidik adalah proyek-proyek pembangunan jalur kereta di Sulawesi Selatan, Jawa Tengah, Jawa Barat, hingga Sumatera. Semua proyek tersebut berada dalam tanggung jawab DJKA, yang secara struktural berada di bawah Kementerian Perhubungan.

"Kami perlu memastikan bagaimana proses perencanaan, persetujuan, hingga pelaksanaan proyek-proyek itu. Diduga ada pengaturan yang sistematis," kata Budi Prasetyo. Ia menambahkan bahwa KPK juga telah menetapkan satu tersangka baru dari klaster DPR, yaitu Sudewo.

Pada 2023, KPK melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang mengun-

kap adanya transaksi suap dalam proyek DJKA tahun anggaran 2018-2022. Dalam operasi itu, 25 orang diamankan di Jakarta, Depok, Semarang, dan Surabaya.

Selain menangkap para pihak, penyidik menyita uang tunai Rp2,027 miliar, US\$20.000, kartu debit senilai Rp346 juta, dan saldo rekening bank Rp150 juta. Total nilai barang bukti mencapai sekitar Rp2,823 miliar.

OTT DJKA menjadi salah satu operasi besar yang dilakukan KPK setelah serangkaian OTT sektor transportasi sejak 2016. Pada 2017, misalnya, KPK pernah membongkar kasus suap perizinan di lingkungan Kementerian Perhubungan yang menandai adanya kerentanan korupsi pada sektor pengadaan sarana dan prasarana.

Secara nasional, kasus korupsi di sektor perkeretaapian bukan pertama kali terjadi. Pada 2005, mantan pejabat PT KAI terlibat kasus mark-up pengadaan rel dan suku cadang. Pada 2012, KPK juga menangani skandal suap Tender Pengadaan Pekerjaan Perkeretaapian wilayah Sumatera.

Rentetan peristiwa itu menunjukkan bahwa sistem pengadaan pada sektor transportasi strategis masih menghadapi tantangan struktural. Transparansi pengadaan menjadi salah satu titik lemah yang kerap dimanfaatkan pihak tertentu.

Dalam konteks penegakan hukum,

KPK menegaskan bahwa pemeriksaan terhadap pejabat kementerian merupakan bagian dari pendalaman fakta hukum, bukan penetapan status tersangka. "Kami hanya ingin mendapatkan gambaran menyeluruh. Informasi dari Pak Budi tentu akan sangat membantu," ujar Budi Prasetyo.

Hingga kini, KPK belum menjadwalkan ulang pemeriksaan terhadap Budi Karya. Namun lembaga tersebut memastikan bahwa setiap pihak yang mengetahui proses proyek wajib memberikan keterangan.

KPK menilai bahwa keberlanjutan penyidikan sangat penting untuk mencegah korupsi berulang. Pengungkapan kasus DJKA diharapkan menjadi momentum memperbaiki tata kelola proyek infrastruktur strategis nasional.

Kasus ini juga dipandang sebagai pengingat bahwa integritas pejabat publik berperan penting dalam menjaga keberlangsungan program pembangunan. Pemerintah dinilai perlu memperkuat transparansi serta digitalisasi sistem pengadaan agar potensi korupsi dapat diminimalkan.

Hingga berita ini diturunkan, KPK masih melakukan pendalaman terhadap aliran dana dan pihak lain yang diduga turut terlibat dalam pengaturan proyek jalur kereta di berbagai wilayah. (\*)

## KPK Dalami Peran Budiman dalam Pemanfaatan Safe House Kasus Suap Bea Cukai



Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yakni Budiman Bayu Prasajo (BPP) untuk mendalami pemanfaatan tempat aman atau safe house dalam kasus dugaan suap terkait importasi dan gratifikasi, Senin (23/2)

### Laporan: Hadi

J A K A R T A , BP-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memeriksa pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Budiman Bayu Prasajo (BPP), untuk mendalami pemanfaatan safe house yang diduga menjadi lokasi penyimpanan uang hasil suap importasi. Pemeriksaan berlangsung pada Senin (23/2) di Gedung KPK, Jakarta.

Pemeriksaan tersebut dilakukan setelah Budiman sebelumnya tidak hadir pada panggilan Rabu (18/2) dengan alasan sakit. Keterangan Budiman dinilai penting karena penyidik tengah menelusuri praktik yang dilakukan secara sistematis melalui sejumlah titik yang digunakan sebagai tempat penyimpanan dana.

KPK menyebut pemanfaatan safe house bukan pertama kali terjadi dalam kasus korupsi di Indonesia. Pada 2017 misalnya, lembaga antirasuah pernah mengungkap safe house yang menjadi lokasi penyerahan uang dalam kasus suap auditor BPK. Di tingkat global, penggunaan safe house juga tercatat dalam investigasi antikorupsi di Asia Tenggara, seperti operasi Komisi Pemberantasan Korupsi Malaysia (MACC).

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menegaskan bahwa penyidik ingin memastikan apakah tempat tersebut hanya digunakan untuk menyimpan uang atau memiliki fungsi lain yang berkaitan dengan praktik gratifikasi dan suap dalam proses importasi.

"Kami mendalami apakah safe house itu hanya untuk penempatan uang atau digunakan untuk aktivitas lain yang berkaitan dengan alur suap," ujar Budi di Jakarta.

Selain Budiman, penyidik berencana memanggil saksi lain dari kalangan internal Bea dan Cukai serta pihak swasta guna mengurai aliran dana yang menjadi inti perkara. Penelusuran aliran dana ini merupakan bagian dari upaya membangun konstruksi hukum yang komprehensif.

Budi juga menambahkan bahwa penyidik akan memperjelas dugaan keterlibatan Budiman dalam aliran uang yang ditemukan sebelumnya. "Ini yang masih kami dalami, termasuk kemungkinan adanya dana yang mengalir kepada saudara BPP," ucapnya.

Budiman sendiri sempat diamankan melalui operasi tangkap tangan (OTT) beberapa waktu lalu. Namun ia dilepas kembali karena masih berstatus saksi dan belum cukup bukti untuk peningkatan status hukum.

Dalam perkembangan penyidikan, KPK telah menahan enam tersangka yang merupakan pejabat Bea Cukai dan pihak swasta. Mereka diduga menerima maupun memberikan suap terkait proses importasi barang.

Para tersangka dari unsur Bea Cukai meliputi mantan Direktur Penyidikan & Penindakan DJBC periode 2024 "Januari 2026, Rizal; Kasubdit Intel P2 DJBC, Sispryan Subiaksono; serta Kasi Intel DJBC, Orlando. Sementara dari unsur swasta adalah Ketua Tim Dokumen Impor-

tasi PT BR, Andri; pemilik PT Blueray, John Field; dan Manajer Operasional PT BR, Dedy Kurniawan.

KPK menetapkan mereka dengan pasal yang berbeda sesuai peran masing-masing. Rizal, Sispryan, dan Orlando dijerat Pasal 12 huruf a dan huruf b UU Tipikor serta Pasal 605 ayat 2 dan Pasal 606 ayat 2 KUHP juncto Pasal 20 dan 21 KUHP. Ketiganya juga disangkakan melanggar Pasal 12B UU Tipikor.

Sementara tiga tersangka swasta dijerat Pasal 605 ayat 1 huruf a dan b serta Pasal 606 ayat 1 KUHP. Penyidik menilai pemberi suap berperan membuka jalur keuntungan dalam proses importasi melalui sejumlah pejabat Bea Cukai yang memiliki kewenangan besar.

Dalam serangkaian pengeledahan, penyidik menemukan uang sebesar Rp5 miliar dalam sebuah koper di safe house yang berada di Ciputat, Tangerang Selatan. Temuan ini memperkuat dugaan bahwa lokasi tersebut menjadi bagian dari skema penyaluran dana suap.

Historisnya, pengungkapan kasus korupsi melalui temuan uang besar dalam safe house juga tercatat dalam operasi besar di berbagai negara. Salah satunya adalah kasus suap pejabat kepabeanan di Filipina pada 2019, di mana dana puluhan juta peso ditemukan dalam apartemen rahasia.

Penyidikan kasus Bea Cukai ini diperkirakan masih akan berlangsung intensif. KPK menegaskan bahwa setiap pihak yang diduga terlibat akan dipanggil dan dimintai keterangan untuk memastikan seluruh rangkaian alur suap dapat diungkap secara menyeluruh. (\*)

## Musrenbang Sorawolio, Usulan Warga Sorawolio Dikaji, Potensi Pangan Jadi Fokus Pembahasan



Laporan: Prasetyo M

BAUBAU, DT-Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat Kecamatan Sorawolio tahun 2026 pada Rabu (18/02/2026) menjadi forum penting yang kembali menegaskan urgensi sinkronisasi perencanaan daerah dengan aspirasi masyarakat. Kegiatan yang berlangsung di aula kantor camat itu memperlihatkan dinamika diskusi antara pemerintah kecamatan, anggota legislatif, dan perwakilan masyarakat mengenai arah pembangunan wilayah.

Sejumlah anggota DPRD Kota Baubau dari Daerah Pemilihan (Dapil) 2 turut hadir, salah satunya Hasan Basri, yang menekankan bahwa Musrenbang tidak boleh menjadi rutinitas formalitas. Ia menegaskan pentingnya pengawalan program hingga level tertinggi. "Pembangunan tidak boleh diklaim perseorangan karena ini kerja kolektif," ujarnya dalam forum tersebut.

Di sisi lain, La Ode Hadia menyampaikan perhatian khusus kepada keberadaan perangkat adat, terutama Parabela, yang menurutnya

memiliki peran besar dalam menjaga keseimbangan sosial. Ia mendorong pemerintah untuk "memberikan honorarium layak sebagai penghargaan atas kontribusi spiritual dan kultural mereka."

Sementara itu, Camat Sorawolio, Muslimin, menggambarkan bahwa proses pengumpulan usulan masyarakat telah berlangsung dua pekan sebelumnya di tingkat kelurahan. Namun, ia juga mengingatkan adanya pembatasan anggaran yang harus dipahami bersama. Dana kelurahan yang masih berada di angka Rp200 juta disebut hanya dapat digunakan untuk sarana prasarana dan pemberdayaan karena telah dispendung.

Dalam paparannya, Muslimin menjelaskan adanya ketimpangan antara banyaknya usulan masyarakat dan realisasi program di lapangan. "Sering yang diusulkan 15, terealisasi hanya satu. Karena itu input usulan ke sistem perlu diperkuat agar terbaca oleh OPD," katanya.

Perwakilan Baperida Kota Baubau, Sumartoyo, menjelaskan bahwa Musrenbang adalah amanat UU No. 25 Tahun 2004 sehingga prosesnya

wajib berjalan meski anggaran terbatas. Ia menegaskan bahwa seluruh usulan akan diverifikasi untuk kemudian disesuaikan dengan APBD Kota, APBD Provinsi, hingga APBN apabila dimungkinkan.

Dalam forum tersebut, pembahasan mengenai potensi Sorawolio sebagai pusat suplai pangan kembali mencuat. Menurut La Ode Hadia, Sorawolio dan Bungi memiliki potensi strategis menjadi lumbung pangan bagi Baubau, Muna, hingga Kabupaten Buton. Potensi ini dinilai sejalan dengan sejarah sektor pertanian nasional, di mana kawasan-kawasan pinggir kota sering menjadi penyangga kebutuhan pangan, sebagaimana terjadi pada era swasembada pangan Indonesia tahun 1984.

Secara global, banyak kawasan administratif kecil yang dioptimalkan sebagai pusat suplai pangan untuk memperkuat ketahanan wilayah. Contohnya adalah model "Food Belt" di Beijing dan Tokyo yang menjadi rujukan internasional bagi daerah-daerah yang ingin memperkuat konektivitas logistik dan pasokan pangan berkelanjutan.

Penekanan terhadap peran adat dalam perencanaan

pembangunan juga mengingatkan pada sejarah Nusantara, di mana struktur adat seperti Parabela berfungsi menjaga tatanan sosial dan memberi legitimasi moral bagi pemimpin lokal. Konsep ini sejalan dengan praktik serupa di beberapa negara, seperti sistem "Council of Elders" di Afrika Timur yang turut memengaruhi arah pembangunan komunitas.

Adapun Musrenbang sendiri, sebagai instrumen partisipatif pembangunan, telah menjadi agenda nasional sejak diberlakukannya sistem perencanaan terintegrasi pada awal 2000-an. Forum ini bertujuan mengisi ruang dialog antara masyarakat dan pemerintah agar pembangunan tidak hanya bersifat top-down, tetapi juga bottom-up.

Pelaksanaan Musrenbang Sorawolio 2026 diharapkan mampu menghasilkan prioritas program yang tidak hanya realistis, tetapi juga sejalan dengan visi pembangunan kota secara menyeluruh. Dengan keterlibatan legislatif, eksekutif, dan masyarakat, forum tersebut dinilai dapat menguatkan koordinasi lintas sektor sekaligus memastikan bahwa aspirasi warga tetap menjadi dasar perencanaan pembangunan. (\*)

## Satpol PP Baubau Perketat Penertiban PKL di Pasar Karya Nugraha Selama Ramadan 1447 H



Pewarta: Amat Jr

BAUBAU, BP -Upaya menjaga ketertiban umum di pusat-pusat aktivitas masyarakat kembali diperketat oleh Satpol PP Kota Baubau, terutama selama bulan suci Ramadhan. Pada Minggu (21/02/2026), Pleton Trantibum Regu 1 melaksanakan penataan dan pengawasan intensif terhadap pedagang kaki lima (PKL) di kawasan Pasar Karya Nugraha.

Kegiatan tersebut merupakan bagian dari rutinitas tahunan Satpol PP Baubau yang biasanya meningkat menjelang dan selama Ramadhan untuk mengantisipasi lonjakan aktivitas masyarakat. Penertiban diperlukan lantaran sejumlah PKL masih memanfaatkan badan jalan sebagai lokasi berjualan sehingga mengganggu arus lalu lintas.

Sejumlah pedagang diketahui memindahkan lapaknya setelah diberikan imbauan oleh petugas. Penertiban dilakukan melalui pendekatan persuasif dengan mengedepankan komunikasi humanis. "Kami tidak ingin membuat pedagang merasa tertekan, tetapi tetap harus menjaga ketertiban," ujar seorang petugas Satpol PP saat berada di lokasi.

Penataan PKL di kawasan ini juga menjadi bagian dari implementasi Peraturan Daerah tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, aturan yang telah lama menjadi acuan tata kelola ruang publik di Baubau. Aturan tersebut rutin

diterapkan terutama di titik-titik keramaian.

Dalam pelaksanaannya, para personel memberikan teguran langsung kepada PKL yang berjualan di fasilitas umum. Mereka mengimbau agar pedagang tidak menggunakan badan jalan sehingga aktivitas pengguna jalan tetap berjalan lancar. "Kami berharap pedagang dapat memahami bahwa menjaga ruang publik adalah tanggung jawab bersama," tambah petugas lainnya.

Menurut keterangan Satpol PP, sebagian besar PKL menanggapi imbauan dengan baik dan memindahkan lapaknya ke area yang dinilai lebih aman. Proses penertiban berlangsung kondusif tanpa adanya gesekan antara petugas dan pedagang. Ini menunjukkan partisipasi masyarakat yang semakin baik dalam mendukung ketertiban kota.

Secara historis, penataan PKL di berbagai kota di Indonesia bukanlah hal baru. Di Jakarta, penertiban di kawasan Tanah Abang pernah menjadi sorotan nasional karena besarnya jumlah pedagang yang memadati ruas jalan utama. Bahkan secara global, beberapa kota besar seperti Bangkok dan Mumbai juga menghadapi tantangan serupa dalam menata PKL agar tetap dapat berusaha tanpa mengganggu fasilitas umum.

Satpol PP Baubau menilai pengalaman berbagai kota tersebut dapat menjadi referensi dalam

mengelola ruang publik secara lebih efektif. "Kami ingin mengedepankan edukasi, bukan semata-mata tindakan represif. Pendekatan yang kami lakukan sesuai dengan praktik di banyak kota di dunia," ujar seorang komandan regu.

Penertiban kali ini juga menekankan pentingnya kenyamanan warga selama menjalankan ibadah puasa. Peningkatan arus kendaraan dan aktivitas jual-beli selama Ramadhan membuat kondisi pasar lebih padat sehingga pengawasan harus diperketat.

Kegiatan pengawasan oleh Pleton Trantibum Regu 1 dipastikan akan terus digelar secara rutin sepanjang Ramadhan. Satpol PP Baubau menyatakan komitmennya menjaga situasi tetap kondusif demi kenyamanan masyarakat saat melaksanakan aktivitas harian.

Petugas juga mengingatkan bahwa keberhasilan penataan ruang publik membutuhkan kerja sama seluruh pihak, baik pedagang maupun warga sekitar. Langkah kolaboratif ini diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang tertib dan aman.

Dengan pola pendekatan yang semakin humanis, Satpol PP optimistis penataan PKL dapat berjalan efektif tanpa menimbulkan konflik. Upaya ini sekaligus menjadi bagian dari pembiasaan tata kota Baubau ke arah yang lebih tertib dan teratur. (\*)